

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 108 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 merupakan dokumen yang disusun dikarenakan terjadinya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diakibatkan oleh adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan dengan tetap mempedomani Renstra PD dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 Oktober 2023

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengamati pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan Pada tahun 2023, disamping mengoptimalkan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagai dokumen Perencanaan SKPD yang memuat kebijakan dan program, kegiatan dan subkegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, 5 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



SUKRI, SE
Penata Tk. I / (III.d)
NIP. 19800401 200012 1 001

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINSOSP3AP2KB	23
3.1 Tujuan dan Sasaran	23
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN OPD	25
4.1 Matrik Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 ...	25
4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan	41
BAB V PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas SOSIALP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memuat ; program, kegiatan, dan subkegiatan ; lokasi kegiatan; indikator kinerja; kelompok sasaran; pagu indikatif dan prakiraan maju.

Kedudukan Renja OPD adalah merupakan rincian mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada OPD yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Meranti dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti.

Renja OPD diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. dan merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasis perencanaan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5); dan
13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) di masing-masing Dinas dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah. Renja ini akan menjadi program, kegiatan, SubKegiatan strategis yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, APBD Provinsi maupun APBN.

Berkenaan dengan hal diatas, maka Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 1 tahun dan dijadikan acuan dalam merumuskan standar pengukuran kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Meranti yang selanjutnya dijadikan landasan dalam Penyusunan APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DASRAH TAHUN BERJALAN

Bab Ini berisikan tentang :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah per Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalia Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti

- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang :

- 4.1. Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pagu Indikatif
- 4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan SubKegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Per Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti.

Secara Rinci realisasi program / kegiatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target, faktor-faktor penyebab terpenuhi / tidak terpenuhi target kinerja program / kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian, kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, terlampir dalam **tabel 1.1**

Tabel 1.1
Realisasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas SOSIALP3AP2KB
Kabupaten Kepulauan Meranti Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, perabotan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pchayanan Perangkat Daerah	95	%	23.737.000.000	92	4.415.398.470	95	4.590.618.920	14	642.254.679	20	933.769.508					34	1.576.024.187	63	5.991.422.657	66,32	25,24	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145	Dokumen	190.000.000	29	15.000.000	29	25.000.000	20	10.000.000	9	-					29	10.000.000	58	25.000.000	40,00	13,14	Dinas Sosial P3AP2KB
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	50.000.000	0	-	3	10.000.000	3	10.000.000	0	-					3	10.000.000	3	10.000.000	20,00	20,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110	Laporan	140.000.000	22	15.000.000	22	15.000.000	0	-	22	-					22	-	44	15.000.000	40,00	10,71	
		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi dan Penatuesahan Keuangan Perangkat Daerah	100	%	17.202.000.000	100	3.113.692.470	100	3.281.197.656	25	329.280.137	25	580.055.889					50	909.336.026	75	4.023.028.494	75,00	23,39	Dinas Sosial P3AP2KB
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	Orang /Balan	17.202.000.000	30	3.113.692.470	30	3.281.197.656	30	329.280.137		580.055.889					30	909.336.026	60	4.023.028.494	40,00	23,30	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	3.433.000.000	100	875.453.400	100	429.622.000	34	146.796.150	27	116.564.000					61	263.360.150	81	1.138.813.550	80,50	33,17	Dinas Sosial P3AP2KB
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	56.000.000	0	-	1	10.000.000	1	6.200.000		3.800.000					1	10.000.000	1	10.000.000	20,00	17,80	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44	Paket	705.000.000	11	228.586.000	7	85.000.000	4	45.074.000	2	38.936.000					6	84.010.000	17	312.596.000	38,64	44,34	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	120.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	1	6.000.000		4.000.000					1	10.000.000	2	40.000.000	40,00	33,33	
		Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	344.000.000	2	85.000.000	2	15.000.000	1	8.463.000		-					1	8.463.000	3	93.463.000	30,00	27,17	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	106	Dokumen	54.000.000	0	-	20	10.000.000	0	-		-					0	-	0	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	125.000.000	0	-	12	50.000.000	3	10.000.000		-					3	10.000.000	3	10.000.000	5,00	8	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	790	Laporan	2.029.000.000	150	531.867.400	60	249.622.000	18	71.059.150		69.828.000					18	140.887.150	168	672.754.550	21,27	33,16	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	15	Kegiatan	2.742.000.000	2	364.790.100	3	804.799.564	3	143.778.392		212.349.619					3	356.128.011	5	720.918.111	33,33	26,25	Dinas Sosial P3AP2KB		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Luar (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 12 = 8+9+10+11		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 13 = 6 + 12		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 14 = 13/5*100		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	75.000.000	0	-	12	5.000.000	6	2.500.000	6	2.500.000					12	5.000.000	12	5.000.000	20,00	6,67	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	667.000.000	12	88.349.927	12	135.399.564	3	13.278.392	3	17.849.619					6	31.128.01	18	119.477.938	30,00	17,91	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	2.000.000.000	12	276.440.173	12	664.400.000	3	128.000.000	3	192.000.000					6	320.000.000	18	596.440.173	30,00	29,82	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	170.000.000	100	46.462.500	100	49.999.700	10	12.400.000	15	24.800.000					25	37.200.000	63	83.662.500	62,50	49,21	Dinas Sosial P3AP2KB
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	194	Unit	170.000.000	38	46.462.500	39	49.999.700	4	12.400.000	8	24.800.000					12	37.200.000	50	83.662.500	25,77	49,21	
II	Meningkatnya Penanganan terhadap PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	84	%	752.000.000	88	106.316.000	78	277.712.000	0	-	0	8.830.000					0	8.830.000	44	115.146.000	52,38	15,31	
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil	55	%	279.000.000	34	103.592.000	40	100.000.000	0	-	0	-					0	-	17	103.592.000	30,91	37,13	Dinas Sosial P3AP2KB
		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125	Keluarga	110.000.000	0	-	40	50.000.000	0	-	-	-					0	-	0	0,00	0,00		
		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	125	Keluarga	169.000.000	30	103.592.000	70	50.000.000	0	-	-	-					0	-	30	103.592.000	24,00	61,30	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	77	%	473.000.000	71	2.724.000	71	177.712.000	0	-	-	8.830.000					0	8.830.000	36	11.554.000	46,10	2,44	Dinas Sosial P3AP2KB
		Peningkatan Kemampuan Potensi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	181	Orang	210.000.000	0	-	101	130.000.000	0	-	-	-					0	-	0	0,00	0,00		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	45	Orang	263.000.000	2	2.724.000	9	47.712.000	0	-	-	8.830.000					0	8.830.000	2	11.554.000	4,44	4,39	
III		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	150.890	Orang	933.500.000	30.178	182.500.900	30.178	400.000.000	11.276	27.140.000	1.149	11.440.000					12.425	38.580.000	42.603	221.080.900	28,23	23,68	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	69	%	511.000.000	14	-	26	310.000.000	20	15.182.000	0	-					20	15.182.000	17	15.182.000	24,64	2,97	Dinas Sosial P3AP2KB

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	140	Orang	70.000.000	0	100	50.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00	0,00			
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	45.000.000	0	5	25.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00	0,00			
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	32	Orang	45.000.000	0	20	25.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00	0,00			
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52	Orang	70.000.000	0	40	50.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00	0,00			
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	23	Orang	65.000.000	0	15	45.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00	0,00			
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13	Orang	45.000.000	0	5	25.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00	0,00			
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80	Orang	171.000.000	0	40	90.000.000	0	15.182.000	0	0			0	15.182.000	0	15.182.000	0,00	8,88			
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100	%	422.500.000	100	182.500.900	90.000.000	17	11.958.000	3	11.440.000			20	23.398.000	60	205.898.900	60,00	48,73	Dinas Sosial P3AP2KB		
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	175	Orang	422.500.000	50	182.500.900	90.000.000	9	11.958.000	4	11.440.000			13	23.398.000	63	205.898.900	36,00	48,73			
IV		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85	%	75.600.000.000	65	2.162.728.801	85	2.348.466.650	41	227.071.650	27	122.504.000			68	349.575.650	67	2.512.304.451	78,24	3,32		
		Pengolahan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah Padan dengan data Kependudukan	94	%	75.600.000.000	87	2.162.728.801	89	2.348.466.650	64	227.071.650	34	122.504.000			98	349.575.650	93	2.512.304.451	98,40	3,32	Dinas Sosial P3AP2KB	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	25.000	Orang	15.000.000.000	6.000	47.862.000	10.000	650.000.000	0	0	0	0		0	6.000	47.862.000	24,00	0,32				
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	50.000	Keluarga	3.750.000.000	10.000	84.739.000	10.000	198.466.650	356	18.366.650	4.644	83.700.000		5.000	102.066.650	15.000	186.805.650	30,00	4,98			
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000	Keluarga	56.850.000.000	5.361	2.030.127.801	10.000	1.500.000.000	0	208.705.000	0	38.804.000		0	247.509.000	5.361	2.277.636.801	10,72	4,01			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K
v		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	90	%	659.000.000	100	51.728.000	90	250.078.000	100	0	100	-	-	-	-	100	-	100	51.728.000	111,11	7,85		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	%	334.000.000	100	14.900.000	100	200.000.000	100	-	100	-	-	-	-	100	-	100	14.900.000	100,00	4,46	Dinas Sosial P3AP2KB	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat Bantuan Makanan	225	Orang	334.000.000	18	14.900.000	40	200.000.000	3	-	13	-	-	-	-	16	-	34	14.900.000	15,11	4,46		
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menyenggarakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	150	Orang	325.000.000	30	36.828.000	30	50.078.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	30	36.828.000	20,00	11,33	Dinas Sosial P3AP2KB	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	325.000.000	30	36.828.000	30	50.078.000	0	-	-	-	-	-	-	0	-	30	36.828.000	20,00	11,33		
VI	Meningkatkan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	50	%	607.000.000	20	139.636.000	30	150.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	10	139.636.000	20,00	23,00		
		Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	60	%	131.000.000	15	34.997.000	30	50.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	8	34.997.000	12,50	26,72	Dinas Sosial P3AP2KB	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	158	Perangkat Daerah	131.000.000	20	34.997.000	30	50.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	20	34.997.000	12,66	26,72		
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	35	%	125.000.000	20	22.889.500	20	50.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	10	22.889.500	28,57	18,31	Dinas Sosial P3AP2KB	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Organisasi	125.000.000	24	22.889.500	24	50.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	24	22.889.500	20,00	18,31		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	351.000.000	100	81.749.500	100	50.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	50	81.749.500	50,00	23,29	Dinas Sosial P3AP2KB
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	500	Orang	351.000.000	100	81.749.500	100	50.000.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	100	81.749.500	20,00	23,29		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K
VII		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	%	1.079.268.500	100	163.735.000	100	414.818.492	0	0	100	147.805.150					100	147.805.150	100	311.540.150	100,00	28,87	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	0,004	%	688.950.000	0,008	150.450.000	0,007	224.499.992	0	-	0,008	30.425.000					0,008	30.425.000	0,008	180.875.000	0	26,25	Dinas Sosial P3AP2KB
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	488.950.000	1	150.450.000	1	174.500.000	0	-	0,5	30.425.000					0,5	30.425.000	1,5	180.875.000	30,00	36,99	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	168	Perangkat Daerah	200.000.000	0	-	30	49.999.992	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang disediakan	100	%	168.658.500	100	13.285.000	100	88.658.500	20	-	40	18.736.500					60	18.736.500	80	32.021.500	80,00	18,99	Dinas Sosial P3AP2KB
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut/Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Layanan	168.658.500	7	13.285.000	15	88.658.500	3	-	6	18.736.500					9	18.736.500	16	32.021.500	16,00	18,99	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibaksanakan	5	Kegiatan	221.660.000	0	-	1	101.660.000	0	-	1	98.643.650					1	98.643.650	1	98.643.650	20,00	44,50	Dinas Sosial P3AP2KB
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	141	Orang	221.660.000	0	-	61	101.660.000	0	-	61	98.643.650					61	98.643.650	61	98.643.650	43,26	44,50	
VIII		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkat kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	115	Lembaga	710.000.000	45	294.023.000	115	100.000.000	0	-	56	67.075.550					56	67.075.550	51	361.098.550	43,91	50,86	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Kegiatan	710.000.000	2	294.023.000	2	100.000.000	0	-	2	67.075.550					2	67.075.550	4	361.098.550	40,00	50,86	Dinas Sosial P3AP2KB
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	350.000.000	1	74.023.000	1	50.000.000	0	-	1	34.605.000					1	34.605.000	2	108.628.000	40,00	31,04	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	360.000.000	1	220.000.000	1	50.000.000	0	-	1	32.470.550					1	32.470.550	2	252.470.550	40,00	70,13	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV									
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.
IX		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfrenensi	100	%	1.925.000.000	100	156.233.500	100	370.033.394	100	-	100	127.065.000					100	127.065.000	100	283.298.500	100,00	14,72	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang di sediakan	100	%	1.400.000.000	100	58.908.500	100	320.033.394	16	-	8	80.033.000					24	80.033.000	62	138.941.500	62,00	9,92	Dinas Sosial P3AP2KB
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	250	Orang	500.000.000	6	-	50	50.000.000	8	-	4	-					12	-	18	-	7,20	0,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	275	Layanan	900.000.000	6	58.908.500	55	270.033.394	8	-	4	80.033.000					12	80.033.000	18	138.941.500	6,55	15,44	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	Kegiatan	525.000.000	1	97.325.000	1	50.000.000	0	-	1	47.032.000					1	47.032.000	2	144.357.000	20,00	27,50	Dinas Sosial P3AP2KB
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	525.000.000	1	97.325.000	1	50.000.000	0	-	1	47.032.000					1	47.032.000	2	144.357.000	40,00	27,50	
X	Terkendala Laju Pertumbuhan Penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	1	%	750.000.000	1	89.325.000	1	178.200.000	1	74.599.192		1.439.192					1	76.038.384	1	165.363.384	100,00	22,05	
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5	Dokumen	250.000.000	0	-	1	50.000.000	1	48.520.000		-					1	48.520.000	1	48.520.000	20,00	19,41	
		Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (PKKBN) Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (PKKBN) Formal	5	Dokumen	150.000.000	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5*100	15										
		Penetapan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5	Kegiatan	350.000.000	1	89.325.000	1	118.200.000	1	26.079.192		1.439.192			1	27.518.384	2	116.843.384	40,00	33,38	Dinas Sosial	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	45	Dokumen	350.000.000	9	89.325.000	9	118.200.000	2	26.079.192		1.439.192			2	27.518.384	11	116.843.384	24,44	33,38		
XI		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	75	%	9.650.000.000	51	1.607.097.000	72	2.084.572.000	26	436.379.000	30	543.718.500			56	980.097.500	54	2.587.194.500	71,33	26,81		
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	30	Kegiatan	3.300.000.000	5	559.837.000	4	810.350.000	3	160.810.000		229.540.000			3	390.350.000	8	950.187.000	26,67	28,79	Dinas Sosial	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB/BPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB/BPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	5	Dokumen	750.000.000	1	25.000.000	1	160.000.000	0	-	0	-			0	-	1	25.000.000	20,00	3,33		
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KB/BPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minitok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minitok)	90	Laporan	850.000.000	18	139.320.000	18	137.000.000	4	34.020.000	9	51.840.000			13	85.860.000	31	225.180.000	34,44	26,49		
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB/BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	45	Laporan	1.300.000.000	9	355.527.000	9	433.350.000	2	86.790.000	3	137.700.000			5	224.490.000	14	580.017.000	31,11	44,62		
		Pengendalian Program KB/BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KB/BPK	10	Laporan	400.000.000	2	39.990.000	2	80.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000			2	80.000.000	4	119.990.000	40,00	30,00		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang diayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	%	3.000.000.000	100	484.800.000	100	552.600.000	25	112.279.000	25	123.218.500			50	235.497.500	75	720.297.500	75,00	24,01	Dinas Sosial	
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	45	Unit	1.000.000.000	0	-	9	100.000.000	2	21.879.000	3	32.818.500			5	54.697.500	5	54.697.500	11,11	5,47		
		Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesasan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesasan (IMP)	15.150	Orang	2.000.000.000	3.030	484.800.000	3.030	452.600.000	605	90.400.000	605	90.400.000			1.210	180.800.000	4.240	665.600.000	27,99	33,28		
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Akt dan Obat Kontrasepsi untuk Pelaksanaan Pelayan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi akt dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	47	%	1.350.000.000	35	116.560.000	38	309.622.000	10	76.290.000	5	34.960.000			15	111.250.000	25	227.810.000	53,19	16,87	Dinas Sosial	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Pemanjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Pemanjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	71	Laporan	100.000.000	11	4.950.000	15	13.500.000	0	-	-	-	-	-	-	0	-	11	4.950.000	15,49	4,95	
		Peningkatan Kesertian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2500	Orang	1.000.000.000	569	111.610.000	610	272.422.000	171	76.290.000	78	34.960.000				249	111.250.000	818	222.860.000	32,72	22,29	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	75	Laporan	250.000.000	0	-	15	23.700.000	0	-	-	-				0	-	0	-	0,00	0,00	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertian Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertian Ber-KB	100	%	2.000.000.000	100	445.900.000	100	412.000.000	19	87.000.000	38	156.000.000				58	243.000.000	79	688.900.000	78,85	34,45	Dimas Sosial P3AP2KB
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	130	Kampung	2.000.000.000	26	445.900.000	26	412.000.000	5	87.000.000	10	156.000.000				15	243.000.000	41	688.900.000	31,54	34,45	
XII		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	82	%	7.750.000.000	48	877.519.427	73	2.096.100.000	10	79.092.000	38	343.160.000				48	422.252.000	48	1.299.771.427	58,54	16,77	
		Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	%	7.350.000.000	31	877.519.427	80	2.016.100.000	23	79.092.000	59	303.810.000				82	382.902.000	57	1.260.421.427	56,50	17,15	Dimas Sosial P3AP2KB
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	30	Kelompok	450.000.000	0	-	6	50.000.000	6	50.000.000	-	-				6	50.000.000	6	50.000.000	20,00	11,11	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	125	Unit	2.000.000.000	22	352.110.000	20	380.000.000	0	-	-	-				0	-	22	352.110.000	17,60	17,61	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.705	Orang	4.500.000.000	741	525.409.427	741	1.556.100.000	0	-	145	303.810.000				145	303.810.000	886	829.219.427	23,91	18,43	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	5	Laporan	400.000.000	0	-	1	30.000.000	1	29.092.000	-	-	-	-	1	29.092.000	1	29.092.000	20,00	7,27		
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	74	%	400.000.000	0	-	66	80.000.000	0	-	67	39.350.000	-	-	67	39.350.000	34	39.350.000	45,27	9,84	Dinas Sosial P3AP2KB	
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	5	Laporan	400.000.000	0	-	1	80.000.000	0	-	1	39.350.000	-	-	1	39.350.000	1	39.350.000	20,00	9,84		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerja sama yang sinergis antara pimpinan dan bidang serta dengan stakeholder lainnya dalam upaya meningkatkan kinerja</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kurangnya SDM Aparatur yang ada guna melaksanakan Program Kegiatan subkegiatan</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan Kinerja Masing-masing Bidang dan melaksanakan Kegiatan secara terstruktur</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja perangkat daerah Kabupaten berikutnya :</p>																								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti, merupakan pelayanan di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kabupaten yang terdiri atas :

- a. Pemberdayaan Sosial
- b. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- c. Rehabilitasi Sosial
- d. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Penanganan Bencana
- f. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- g. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan
- h. Perlindungan Perempuan
- i. Peningkatan Kualitas Keluarga
- j. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- k. Pemenuhan Hak Anak
- l. Perlindungan Khusus Anak
- m. Pengendalian Penduduk
- n. Pembinaan Keluarga Berencana
- o. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pemberdayaan Sosial Meliputi :

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) ;
- b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota.

2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan :

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

3. Rehabilitasi Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

- 4. Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :**
 - a. Pemeliharaan Anak-anak terlantar;
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota dengan Sub Keempatnya.
- 5. Penanganan Bencana meliputi:**
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota;
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota.
- 6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan:**
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 7. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Meliputi:**
 - a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota;
 - c. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan Kewenangan kabupaten/Kota.
- 8. Perlindungan Perempuan meliputi :**
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten/Kota;
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 9. Peningkatan Kualitas Keluarga meliputi :**
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 10. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak meliputi :**
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

11. Pemenuhan hak Anak meliputi :

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota.

12. Perlindungan Khusus Anak meliputi :

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kabupaten/Kota;
- c. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota.

13. Pengendalian Penduduk meliputi :

- a. Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

14. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) meliputi :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

15. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Meranti sejak Tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan pertumbuhannya. fakta sosial ini menjadi sangat berkembang, dan menjadi ironis ditengah keinginan masyarakat dan zaman menuntut adanya perbaikan kesejahteraan bagi dirinya dengan melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang baik, pemahaman teknologi yang makin maju, dan penguatan ekonomi produksi keluarga yang kokoh.

Indikator-indikator kemajuan suatu masyarakat adalah mulai mengurangnya fakta sosial diatas dalam hal ini adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai jawaban keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti mengatasi permasalahan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Adapun kemajuan-kemajuan tersebut antara lain adalah keterjangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah. Selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai kepentingan di Kabupaten Meranti telah meningkat cukup signifikan dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, (yakni berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Meranti) dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- a. Cakupan atau jangkauan pelayanan terhadap PPKS yang masih sangat terbatas,
- b. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain,

- c. Belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,
- d. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
- e. Masih Kurangnya peran serta perempuan dalam proses pembangunan daerah,
- f. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana
- g. Rendahnya partisipasi masyarakat melalui Iinstitusi Masyarakat Pedesaan dalam pengembangan program Keluarga Berencana
- h. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Tantangan dan Peluang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PPKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak. Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka perlu didukung dengan serta antara pemerintah dan masyarakat.

Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kabupaten Meranti jumlahnya makin meningkat akibat dari kompleksitas permasalahan sosial ekonomi didalamnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, beberapa ancaman dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- b. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap anak terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Belum optimalnya PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MOW MOP Implant dan IUD)
- h. Budaya masyarakat yang masih mempertahankan pemahaman “*banyak anak banyak rezeki*”.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pemerintah pusat melalui program penanggulangan kemiskinan ekstreme menjadi nol persen pada tahun 2024.
- b. Adanya regulasi yang mengatur tentang pembagian urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten.
- c. Komitmen kepala Daerah terpilih yang telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan penanganan PPKS di daerah.
- d. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak,

seperti UNICEF dan UNDP.

- e. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- h. Makin baiknya aksesabilitas dan layanan keluarga berencana.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MERANTI

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS.
 - Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk.
- c. Meningkatkan Kesetaraan Gender. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						
				SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	N/A	15	20	33	67	93
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi OPD	Nilai	N/A	15	18	20	25	29
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	25,28	24,61	22,10	19,50	19	18
		Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%	77	79	88	91	93	95
		Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15
3.	Meningkatkan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender	%	86,30	86,40	86,50	87,50	87,90	88,56
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	%	96	97	100	100	100	100
			Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	5,06	6,11	7,90	9,70	10,51	11,23

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

4.1 Matrik Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 DinsosP3AP2KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															7,866,875,570	7,020,972,657			12,192,360,403		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															4,590,618,920	3,934,050,007			6,123,110,403	
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															25,000,000	22,152,400			54,000,000
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	95 %	4 Dokumen	4 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	21,000,000		
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	95 %	25 Laporan	25 Laporan	29 Dokumen	29 Dokumen	15,000,000	12,152,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	33,000,000		
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															3,281,197,656	2,405,493,543			4,288,910,403
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	95 %	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	12 Bulan	12 Bulan	3,281,197,656	2,405,493,543	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	4,288,910,403		
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															429,622,000	317,284,800			834,150,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	26,250,000			
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	13 Paket	13 Paket	12 Bulan	12 Bulan	85,000,000	89,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	147,400,000			
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	2 Paket	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	24,200,000			
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	5 Paket	5 Paket	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	8,463,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	69,300,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	95 %	20 Dokumen	20 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	21,000,000	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	126,000,000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	137 Laporan	137 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	249,622,000	189,811,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	420,000,000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											804,799,564	939,119,564			726,050,000		
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	11,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	95 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	135,399,564	135,399,564	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	141,750,000	
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	95 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	664,400,000	798,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	573,300,000	
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											49,999,700	249,999,700			220,000,000		
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	25 Unit	25 Unit	129 Unit	129 Unit	49,999,700	49,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	55,000,000	
1 06 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	95 %	95 %	2 Unit	2 Unit	129 Unit	129 Unit	0	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95 %	165,000,000	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											277,712,000	192,314,000			483,000,000		
1 06 02 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)											100,000,000	20,000,000			294,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 06 02 2.01 01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	78 %	40 Keluarga	40 Keluarga	42 Keluarga	42 Keluarga	50,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	78 %	136,500,000	
1 06 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	78 %	70 Keluarga	70 Keluarga	42 Keluarga	42 Keluarga	50,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	78 %	157,500,000	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											177,712,000	172,314,000			189,000,000		
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	78 %	101 Orang	101 Orang	37 Orang	37 Orang	130,000,000	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	78 %	136,500,000	
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 %	78 %	9 Orang	9 Orang	37 Orang	37 Orang	47,712,000	42,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	78 %	52,500,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											400,000,000	336,163,000			598,750,000		
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial											310,000,000	310,000,000			441,250,000		
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Oran g	30178 Oran g	100 Orang	100 Orang	53 Orang	53 Orang	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Oran g	52,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Oran g	30178 Oran g	5 Orang	5 Orang	53 Orang	53 Orang	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Oran g	26,250,000			
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Oran g	30178 Oran g	20 Orang	20 Orang	53 Orang	53 Orang	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Oran g	36,750,000			
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Oran g	30178 Oran g	40 Orang	40 Orang	53 Orang	53 Orang	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Oran g	105,000,000			
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Oran g	30178 Oran g	15 Orang	15 Orang	53 Orang	53 Orang	45,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Oran g	47,250,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Oran g	30178 Oran g	5 Orang	5 Orang	53 Orang	53 Orang	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Oran g	26,500,000	
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Oran g	30178 Oran g	40 Orang	40 Orang	53 Orang	53 Orang	90,000,000	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Oran g	147,000,000	
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										90,000,000	26,163,000				157,500,000		
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30178 Oran g	30178 Oran g	65 Orang	65 Orang	65 Orang	65 Orang	90,000,000	26,163,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	30178 Oran g	157,500,000	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										2,348,466,650	2,329,411,650				4,830,000,000		
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										2,348,466,650	2,329,411,650				4,830,000,000		
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a yang Didata	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kot a	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	10000 Oran g	10000 Oran g	53150 Kelua rga	53150 Kelua rga	650,000,000	668,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	2,100,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	10000 Keluarga	10000 Keluarga	53150 Keluarga	53150 Keluarga	1,500,000,000	1,461,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	2,625,000,000	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											250,078,000	229,034,000		157,500,000			
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											200,000,000	200,000,000		52,500,000			
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	40 Orang	40 Orang	95 Orang	95 Orang	200,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	90 %	52,500,000	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											50,078,000	29,034,000		105,000,000			
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	50,078,000	29,034,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	90 %	105,000,000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											1,034,851,886	1,009,851,886		1,199,834,425			
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											150,000,000	150,000,000		262,500,000			
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											50,000,000	50,000,000		52,500,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	12 Organisasi	12 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	30 %	105,000,000	
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											50,000,000	50,000,000			105,000,000		
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan pada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	100 Orang	100 Orang	1 Lembaga	1 Lembaga	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	30 %	105,000,000	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											414,818,492	414,818,492			287,834,425		
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											224,499,992	224,499,992			88,000,000		
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan dalam Rangka Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	174,500,000	174,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	100 %	44,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Layanan	15 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	88,658,500	88,658,500	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	100 %	93,091,425	
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											101,660,000	101,660,000		106,743,000			
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	61 Orang	61 Orang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	101,660,000	101,660,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	100 %	106,743,000	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											100,000,000	100,000,000		187,500,000			
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											100,000,000	100,000,000		187,500,000			
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Lembaga a/Anak	115 Lembaga a/Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	15 Lembaga	15 Lembaga	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	115 Lembaga a/Anak	82,500,000	
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Lembaga a/Anak	115 Lembaga a/Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	15 Lembaga	15 Lembaga	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	115 Lembaga a/Anak	105,000,000	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											370,033,394	345,033,394		462,000,000			
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											320,033,394	295,033,394		351,750,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	55 Layanan	55 Layanan	50,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	100 %	105,000,000	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	55 Layanan	55 Layanan	55 Layanan	55 Layanan	270,033,394	270,033,394	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	100 %	246,750,000	
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											50,000,000	50,000,000			110,250,000		
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	100 %	110,250,000	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											4,358,872,000	4,339,410,960			4,072,790,600		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											178,200,000	168,200,000			223,860,000		
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											60,000,000	50,000,000			99,750,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang disusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang disusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	1 %	68,250,000					
2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang disusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Tersedianya Dokumen Hasil Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang disusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	1 %	31,500,000					
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											118,200,000	118,200,000				124,110,000					
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang disusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 %	9 Dokumen	9 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	118,200,000	118,200,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang disusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	1 %	124,110,000					
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											2,084,572,000	2,095,110,960				1,999,775,600					
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal											810,350,000	786,470,000				571,017,500					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	160,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	11,000,000	
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	18 Laporan	18 Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	137,000,000	123,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	21,000,000	
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	9 Laporan	9 Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	433,350,000	433,350,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	455,017,500	
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	2 Laporan	2 Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	80,000,000	80,000,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	84,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB)	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	9 Unit	9 Unit	14 Orang	14 Orang	100,000,000	134,418,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	210,000,000			
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB)	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	3030 Orang	3030 Orang	14 Orang	14 Orang	452,600,000	452,600,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	475,230,000			
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota											309,622,000	309,622,000				310,928,100			
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersedianya Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	15 Laporan	15 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13,500,000	13,500,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	0			
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	610 Orang	610 Orang	12 Laporan	12 Laporan	272,422,000	272,422,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	286,043,100			
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersedianya Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	15 Laporan	15 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23,700,000	23,700,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	24,885,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta bagi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	26 Kampung	26 Kampung	26 Kampung	26 Kampung	412,000,000	412,000,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	72 %	432,600,000	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											2,096,100,000	2,076,100,000		1,849,155,000			
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											2,016,100,000	1,996,100,000		1,765,155,000			
2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	76 %	3 Kelompok	3 Kelompok	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	76 %	78,750,000	
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	76 %	20 Unit	20 Unit	12 Laporan	12 Laporan	380,000,000	360,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKB-KB	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	76 %	21,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	76 %	741 Orang	741 Orang	12 Laporan	12 Laporan	1,556,100,000	1,556,100,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	76 %	1,633,905,000	
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	76 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	76 %	31,500,000	
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											80,000,000	80,000,000				84,000,000	
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	76 %	1 Laporan	1 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	80,000,000	80,000,000	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	76 %	84,000,000	
TOTAL												13,260,599,456	12,370,235,503				17,464,985,428	

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana program, Kegiatan, dan SubKegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

b. Program Pemberdayaan Sosial

1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT;
 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT.
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;

- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan;
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
 - Pemberian Layanan Rujukan.
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NaPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Rujukan.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

e. Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan.
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

f. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
- 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi.
- 3. Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

g. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

h. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

i. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Penyediaan Layanan Bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

j. Program Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

k. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya Lokal;
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - Pengendalian Program KKBPK
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

I. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :
 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun dengan memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023, perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun 2021-2026, usulan program dan kegiatan masyarakat, pengalaman pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sampai dengan saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Renja Perubahan Tahun 2023 ini juga merupakan penjabaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti Tahun 2023.

Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus didukung oleh:

1. Komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi ;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
3. Keberpihakan kepada kesejahteraan sosial pmks ;
4. Peran serta masyarakat, orsos, dan dunia usaha secara aktif ;
5. Sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Kedepan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen dan aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, akan menjadi sebuah Dinas yang mampu memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat yang membutuhkan.

Akhirnya apa yang dapat disusun dalam wujud Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 ini dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (Clean Governance and Good Government) dan semoga bermanfaat.

Demikian untuk dilaksanakan.